

## DAFTAR PUSTAKA

- Akib, H. (2010). Implementasi kebijakan: apa, mengapa, dan bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1-11.
- Akibu, R. S. (2017). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Danau Limboto. *Dialektika*, 2(1), 178-188.
- Andani, A. T. V., Setyowati, E., & Amin, F. (2019). Implementasi Program Pelayanan One Day Service dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Badan Pertanahan Nasional Kota. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 5(3), 328-336.
- Anwar, M. (2015). Filsafat pendidikan. Kencana.
- Armansyah, Y. (2016). MENYOAL RELEVANSI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH DAN OTONOMI PENDIDIKAN DIKAJI DARI KESEJAHTERAAN. *EI-Idare: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(1).
- Data, A. (2014). Teknik Pengumpulan Data. *Jurnal Pendidikan Mipa Susunan Redaksi*, 4(2), 11.
- Fairus, F., & Syah, H. (2020). Analisis Pengendalian Internal Atas Sistem Dan Prosedur Penggajian Dalam Usaha Mendukung Efisiensi Biaya Tenaga Kerja Pada Pt Pancaran Samudera Transport, Jakarta (Internal Control Analysis Of The Payroll's System And Procedures In Supporting The Efficiency Of Labor Costs In Pt. Pancaran Samudera Transport, Jakarta). Analisis Pengendalian Internal Atas Sistem Dan Prosedur Penggajian Dalam Usaha Mendukung Efisiensi Biaya Tenaga Kerja Pada Pt Pancaran Samudera Transport, Jakarta.
- Hadel, C. J., & Samaloisa, R. (2023). Implementasi Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021: Studi Kasus di Desa Plawikan Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten dalam Bidang Ketahanan Pangan. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(9), 4000-4010.
- Heriyantanto, C. P. (2021). Aktivitas Komunikasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Sosialisasi Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).
- Indonesia, P. R. (2002). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

- INDONESIA, P. R. (2003). Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
- Inkiriwang, R. R. (2020). Kewajiban negara dalam penyediaan fasilitas pendidikan kepada masyarakat menurut undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. *Lex Privatum*, 8(2).
- Ismail, I. (2014). Analisis Arah Kebijakan Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Yang Merata Dan Berkualitas Di Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 97831.
- Khairunnisa, K. (2018). Implementasi kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Kolaka (Doctoral dissertation, University Of Muhammadiyah Malang).
- Mandolang, Y., LENGKONG, F. D., & DENGGO, S. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(79).
- Margiyanti, I., & Maulia, S. T. (2023). Kebijakan Pendidikan Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun. *Jurnal Pendidikan Dan Sastra Inggris*, 3(1), 199–208.
- Montolalu, A. A. (2015). Peranan pemerintah dalam mewujudkan pendidikan wajib belajar di kecamatan Matuari Kota Bitung1. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 1(7), 1132.
- Mudjiyanto, B. (2018). Metode penelitian evaluasi komunikasi. *Promedia*, 4(1), 76-102.
- Munthe, A. P. (2015). Pentingnya evaluasi program di institusi pendidikan: sebuah pengantar, pengertian, tujuan dan manfaat. *Scholaria: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 5(2), 1-14.
- Qurais, R. T., Madiong, B., & Makkawaru, Z. (2023). ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KOTA MAKASSAR. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 5(2), 226-231.
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2017 Tentang Wajib Belajar Pendidikan Menengah
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2006 Tentang Rencana Kerja Pemerintah

- Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar
- Peraturan Walikota Makassar No. 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan
- Peraturan Walikota Makassar No. 82 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan
- Ridwan, I., & Sumirat, I. R. (2021). Kebijakan desentralisasi pendidikan di era otonomi daerah. *Jurnal Pendidikan Karakter JAWARA (Jujur, Adil, Wibawa, Amanah, Religius, Akuntabel)*, 7(1).
- Sabir, A., Aldino, A., & Nofrianni, E. (2023). PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR 9 TAHUN DI DESA DATAR KECAMATAN MUKO-MUKO BATHIN VII. *JISOS: JURNAL ILMU SOSIAL*, 2(1), 1341-1352.
- Shofiyah, S. (2021). Implementasi Pembelajaran Al-Qur'an Metode Ummi Dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur'an Di TPQ Nurul Hidayah Jln. Sunan Kalijogo Dsn. Sembung Ds. Cengkok Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).
- Subianto, A. (2020). Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi.
- Ulumudin, I., & Martono, S. F. (2017). Kajian implementasi program wajib belajar 12 tahun di kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 16(2).
- Wardani, W. K., Astuti, P., & Harsasto, P. (2015). Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun di Provinsi DKI Jakarta (Studi Kota Administrasi Jakarta Timur). *Journal of Politic and Government Studies*, 4(2), 371-388.
- Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, 30(2), 129-153.
- Yulianti, D. (2018). Implementasi program kemitraan dalam corporate social responsibility (CSR) melalui pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan kesejahteraan. *Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya*, 20(1), 11-21.
- Yusuf, M. (2021). Pendidikan holistik menurut para ahli.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN









